

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat strategis secara geopolitik. Wilayah ini membentang dari Mesir di Afrika Utara hingga Iran di Asia Barat dan dari Turki di Anatolia hingga Yaman di ujung selatan Semenanjung Arab. Melihat cakupan wilayah ini, Timur Tengah sangat penting secara geografis dan politik. Secara historis misalnya, Timur Tengah merupakan salah satu tempat awal kemunculan peradaban maju manusia, tepatnya di tepian Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Selain itu, Timur Tengah memiliki signifikansi yang luar biasa bagi perkembangan peradaban dunia, mulai dari penemuan hal baru hingga munculnya sumber energi yang penting, seperti minyak bumi dan gas alam (Soliman & Hussein, 2022).

Salah satu dari negara yang tergabung dalam Timur Tengah adalah Irak. Irak merupakan negara di Timur Tengah yang cukup besar dan berpengaruh secara historis. Negara tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan, khususnya di kawasan Mesopotamia. Secara historis, kemunculan Irak tidak lepas dari pengaruh kolonialisme, seperti kebanyakan negara-negara tetangganya. Irak dahulu sempat menjadi koloni dari Inggris pasca jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1920. Satu dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1932, Irak diberi otonomi khusus oleh Inggris sebagai negara yang memiliki pemerintahan sendiri dibawah naungan *Commonwealth*. Salah satu dampak terbesar yang dirasakan dari kolonialisme Inggris adalah terbentuknya batas negara yang *artificial*, seringkali tidak memperhatikan komposisi etnis dan agama di dalam batas negara tersebut (Maizland, 2022).

Irak sebagai jajahan Inggris juga ikut merasakan dampak tersebut, dimana bangsa Arab Mashriqi dan bangsa Kurdi dipaksa bersatu. Kaum Mashriqi memiliki konsentrasi penduduk di kawasan Irak Selatan, khususnya di sepanjang Sungai Eufrat

dan Tigris. Sementara itu, bangsa Kurdi terkonsentrasi di Irak Utara, khususnya di dataran tinggi dekat perbatasan Suriah, Turki, dan Iran. Selain itu, terdapat perbedaan agama yang cukup seimbang, dimana Islam Sunni dan Islam Syiah memiliki persentase 50-50. Masyarakat Sunni umumnya terdapat di Irak bagian tengah dan masyarakat Syiah banyak mendiami kawasan Irak bagian selatan, dekat dengan Teluk Persia. Konflik muncul antara kedua kelompok agama tersebut sejak rezim Saddam berkuasa, terutama kebijakannya yang cenderung memihak Islam Sunni, sehingga menciptakan perasaan diskriminasi oleh Islam Syiah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah prioritas terhadap masyarakat Islam Sunni untuk menduduki berbagai jabatan strategis dalam pemerintahan. Pola kebijakan tersebut meninggalkan luka yang mendalam untuk kelompok Islam Syiah, bahkan setelah kejatuhan rezim Saddam Husein yang dikenal dengan *Ba'athist*. Berdasarkan hal tersebut, Irak memiliki tantangan yang cukup besar untuk mengatasi perbedaannya (Danilovich, 2016, 3-9).

Selain Islam Syiah, diskriminasi juga dirasakan oleh bangsa Kurdi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah arabisasi yang dilakukan pemerintah untuk menghapus identitas bangsa Kurdi. Tekanan selama lebih dari tiga dekade membuat bangsa Kurdi mendukung dan membantu pasukan Amerika Serikat (AS) dalam Perang Irak 2003 untuk menggulingkan rezim *Ba'athist*. Sejak AS berhasil menduduki Irak, otonomi bangsa Kurdi mulai dipertimbangkan dengan serius akibat kontribusinya yang besar dalam Perang Irak 2003. Otonomi Kurdistan Regional Government (KRG) pun semakin kuat meskipun secara *de jure* telah dibentuk sejak tahun 1992. KRG merupakan badan pemerintah lokal yang bertanggung jawab mengatur Kurdistan Irak. Tidak hanya itu, KRG memiliki otoritas yang kuat, bahkan hampir setara dengan pemerintah pusat Irak pada prakteknya (Hiltermann, 2023). Apalagi, saat Irak diserang Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), otomatis Kurdistan Irak dipaksa untuk

membangun pasukannya sendiri melindungi dirinya sendiri dari serangan ISIS. Puncaknya, Kurdistan Irak dapat merebut beberapa wilayah yang secara administrasi bukan merupakan bagian dari Kurdistan Irak.

ISIS sendiri merupakan salah satu faktor utama yang membentuk iklim geopolitik di Timur Tengah, khususnya Kurdistan Irak. Pada saat operasi militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai ISIS pada tahun 2017, Kurdistan Irak merupakan salah satu kekuatan militer yang dominan dan memimpin jalannya serangan ofensif terhadap ISIS. Kurdistan Irak juga mendapatkan banyak bantuan dari para sekutunya, khususnya AS (Garamone, 2022). Dukungan militer ini dinikmati oleh Kurdistan Irak, khususnya sayap militernya, yaitu Peshmerga sejak 2014. AS melihat ISIS sebagai musuh yang mengancam keamanan nasionalnya, bahkan keamanan dunia. Berdasarkan motivasi tersebut, jelas bahwa AS melihat Kurdistan Irak sebagai garda terdepan dalam menangkal serangan yang dilakukan oleh ISIS (Doski, 2023).

Akan tetapi, pasca jatuhnya ISIS, pemerintah Irak secara perlahan mulai mengambil kembali kekosongan kekuasaan yang terjadi akibat agresi ISIS. Akibatnya, KRG mulai terdesak oleh Irak dan Iran, selaku patron utamanya Irak. Di sisi lain, KRG juga mengalami konflik internal berupa faksionalitas antara dua partai terbesar di Kurdistan Irak, yaitu Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Dua partai tersebut selama ini mendominasi politik nasional Kurdistan Irak dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ditempuh KRG selama ini. Persoalan ini membuat kemampuan KRG untuk mengelola rakyat dan wilayahnya menjadi terbatas. Stabilitas ekonomi dan politik menjadi terganggu seiring terjadinya saling boikot antara kedua partai tersebut (Saeed, 2023). Sebagai contoh, wilayah administratif Kurdistan Irak secara pengaruh terbagi oleh dua partai tersebut. Bagian barat Kurdistan Irak yang terdiri dari Dohuk dan Erbil dikuasai oleh KDP, sedangkan

bagian timur terdiri dari Sulaimaniyah diatur oleh PUK. Hal semacam itu menjadi bukti bahwa KRG sebagai badan pemerintahan kurang mampu dalam mengatur Kurdistan Irak (Aydoğan, 2023).

Lebih dari itu, isu rivalitas antara KDP dengan PUK juga dipengaruhi oleh aktor-aktor luar. Salah satu sorotan utama keterlibatan aktor luar adalah terjadinya tensi antara PUK dengan Turki yang notabene merupakan tetangga Kurdistan Irak. Turki menuding PUK membiarkan Kurdistan Workers' Party (PKK) beroperasi di wilayahnya. Patut diketahui bahwa PKK merupakan salah satu organisasi yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki (Najm & Dawod, 2024). Walaupun begitu, Turki berusaha memperbaiki serta memperkuat relasinya dengan PUK. Ankara meyakini bahwa dengan memperkuat hubungan kedua pihak, maka stabilitas politik domestik Kurdistan Irak akan membaik. Selain itu, Turki juga berharap upayanya dapat mendekatkan PUK ke sisi nya (Alaca & Dawod, 2024).

Sayangnya, usahanya dalam ikut campur dalam politik domestik Kurdistan Irak dan keberpihakannya dengan KDP membuat PUK kemungkinan besar tetap mempertahankan hubungannya dengan Iran. Tehran merupakan salah satu aktor regional lain yang memiliki pengaruh cukup besar di Irak. PUK memanfaatkan kepentingan Tehran dengan mendekatkan dirinya dengan para pemangku kebijakan di Tehran. Secara historis, hubungan PUK dengan Iran sudah berlangsung sejak masa Perang Iran-Irak pada tahun 1980. Hal ini membuat secara alamiah posisi PUK lebih condong ke Iran (Khalil, 2018). Tidak hanya itu, Iran menjadi penengah dalam hubungan secara tidak langsung antara PUK dengan PKK. Segitiga Iran-PUK-PKK terbentuk berdasarkan motivasi pragmatis, bukan berdasarkan ideologi atau politik. Oleh karena itu, hubungan aliansi ini dapat dikategorikan sebagai "segitiga strategis". Pertama, jika menganalisis poros segitiga Iran-PUK, terlihat bahwa hubungan kedua

aktor tersebut memiliki latar belakang sejarah yang dalam. Iran dan PUK secara historis memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan Partai Demokrat Kurdistan (KDP), yang memiliki hubungan lebih dekat dengan AS dan Israel (Balci, 2024). Hubungan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persaingan politik antara Erbil dan Sulaymaniyah di Pemerintahan Daerah Kurdi (KRG).

Selain itu, Kurdistan Irak juga mengalami persoalan keamanan energi yang cukup pelik. Hal ini disebabkan oleh terganggunya suplai minyak bumi dari Kurdistan Irak ke aktor-aktor lainnya, seperti Turki. Sumber daya energi Kurdistan Irak memiliki dampak besar terhadap hubungannya dengan negara-negara tetangga seperti Turki dan Iran, serta dengan negara-negara Eropa. Turki, khususnya, memiliki kepentingan besar terhadap sumber daya energi Kurdistan karena kebutuhan strategisnya akan keamanan energi dan perannya sebagai negara transit untuk ekspor minyak dan gas Kurdi. Strategi energi KRG juga berperan dalam keamanan energi Eropa, mengingat gas alam Kurdistan dipandang sebagai alternatif potensial terhadap gas Rusia, terutama di tengah ketegangan geopolitik di Eropa (Araz, 2020). Maka dari itu, isu keamanan energi juga menjadi hal penting dalam persoalan eksistensi Kurdistan Irak.

Melihat dinamika geopolitik yang sangat rumit di Kurdistan Irak, maka bukanlah mustahil bahwa kemungkinan terjadinya konflik internal maupun eksternal dapat terjadi. Saat ini, Kurdistan Irak menjadi bom waktu lantaran krisis internal serta eksternal yang sedang dihadapinya. Patut diketahui bahwa selain terjadinya rivalitas antara KDP dengan PUK dan tekanan dari aktor-aktor eksternal, Kurdistan Irak bukan lagi menjadi prioritas bagi AS, sekutu utamanya (Alaaldin, 2023). Hal tersebut justru dapat membuat krisis politik yang terjadi makin parah akibat tidak adanya *check and balance*. Salah satu buktinya adalah ancaman militer oleh Ankara dan Tehran dengan dalih Kurdistan Irak menjadi sarang dari berbagai kelompok-kelompok militan, seperti

PKK. Tidak hanya itu, adanya ancaman terhadap infrastruktur energi Kurdistan Irak juga menjadi titik utama dalam bahaya keamanan yang dialami oleh Kurdistan Irak. Hal-hal tersebut dapat berpotensi sebagai katalis terhadap konflik Timur Tengah lainnya di tengah berbagai krisis di Gaza dan Laut Merah (Buoninconti & Giurleo, 2024). Maka dari itu, tulisan ini ingin menilik posisi Kurdistan Irak pasca terjadinya rekonfigurasi terhadap konstelasi politik internasional di Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka muncul pertanyaan riset yang ingin menjawab *“Bagaimana upaya KRG dalam melakukan sekuritisasi keamanan energi untuk mempertahankan otonominya di tengah dinamika geopolitik regional serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan politik kawasan?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana masa depan Kurdistan Irak setelah 2024 di tengah berbagai disrupsi dan dinamika geopolitik di Timur Tengah dari 2019 hingga 2024 serta dampaknya bagi kawasan tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memahami pentingnya Kurdistan Irak dalam konstelasi geopolitik di Timur Tengah.
2. Menilai seberapa besar pengaruh energi dan keamanan terhadap Kurdistan Irak.
3. Melakukan prakiraan terhadap arah geopolitik Kurdistan Irak pada masa yang akan mendatang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis, harapannya adalah penelitian ini dapat memperluas cakupan pengetahuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, khususnya mengenai isu keamanan dalam bidang energi serta geopolitik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya permasalahan keamanan dan geopolitik di Kurdistan Irak yang dapat mempengaruhi Timur Tengah. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan relasi antar aktor domestik, regional, dan bahkan internasional. Hal ini lantas menunjukkan bahwa Kurdistan Irak memiliki posisi geopolitik yang strategis. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis, harapannya adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk KRG dalam merumuskan masalah internalnya antara KDP dengan PUK. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengingatkan kedua belah pihak bahwa ada taruhan geopolitik yang besar dihadapan mereka untuk dihadapi. Jika tidak segera diatasi, bukan hal yang mustahil eksistensi Kurdistan Irak sebagai daerah otonomi khusus Irak akan terancam. Ancaman dalam bentuk melemahnya kekuatan politik KRG akan membahayakan Kurdistan Irak dan berpotensi memupuskan harapan bangsa Kurdi untuk mencapai status kenegaraan di masa yang akan mendatang. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi studi kasus bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia dalam mengelola otonomi khusus di tiap-tiap daerahnya. Apalagi,

Indonesia memiliki sejumlah provinsi yang mempunyai otonomi khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua yang mempunyai otonomi khusus agak mirip dengan Kurdistan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka/Literature Review

Dalam mendalami pemahaman mengenai Masa Depan Kurdistan Irak Pasca Kejatuhan ISIS 2019 dan Dampaknya terhadap Geopolitik Timur Tengah, penulis telah menghimpun lima penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi dalam menyusun proposal ini. Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan mendalam terhadap topik yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian pertama merupakan jurnal artikel yang berjudul **KDP-PUK Conflict in Baghdad: A Ticking Time Bomb for Kurdistan Region** oleh Ali Sarbaz Jaff pada tahun 2023. Tulisan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana dinamika hubungan dan konflik antara KDP dan PUK berpengaruh besar bagi Kurdistan Irak. Jaff menjelaskan bahwa kompetisi antara dua partai terbesar di Kurdistan Irak dalam memperebutkan jabatan kepresidenan Irak. Selain itu, keduanya berusaha menjatuhkan satu sama lain dengan memperkuat basis kekuatan serta kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan adanya potensi rusaknya stabilitas politik di Kurdistan Irak. Implikasi dari hal tersebut adalah gagalnya upaya Kurdistan Irak untuk memanfaatkan perpecahan kalangan Syiah di politik domestik Irak. Justru, adanya perseteruan antara KDP dan PUK membuat kohesi KRG menjadi terancam. Konklusi dari penelitian ini memberikan pandangan bahwa kondisi politik domestik Kurdistan Irak saat ini masih dibayang-bayangi oleh rivalitas antara dua partai terbesarnya (Jaff, 2023).

Penelitian sebelumnya kemudian diperkuat oleh penelitian kedua yang berjudul **Cracking the Case: Understanding the Oil Settlement between Erbil and Baghdad**

karya Zirhan Rojhelati dijelaskan bahwa terdapat sengketa minyak bumi antara Erbil dengan Baghdad. Penulis berpendapat bahwa adanya sengketa tersebut disebabkan oleh beberapa hal, termasuk konflik internal dalam KRG antara KDP dengan PUK. Selain itu, permasalahan ini juga diperparah oleh keputusan International Chamber of Commerce (ICC). Keputusan ICC menyatakan bahwa hak atas kontrol minyak bumi di Kurdistan Irak diberikan kepada pemerintah pusat Irak, bukan KRG. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik internal antara KDP dengan PUK membuat posisi Kurdistan Irak semakin merugi, khususnya dalam aspek ekonomi (Rojhelati, 2023).

Untuk menunjang dua penelitian sebelumnya, terdapat penelitian ketiga yang berjudul **The Geopolitics of Iraqi Kurdistan's Gas Reserves: Challenges and Prospects** karya Ranj Aladin pada tahun 2023 yang memaparkan mengenai pengaruh cadangan gas alam Kurdistan Irak terhadap geopolitik Timur Tengah. Menurut Aladin, KRG harus memiliki posisi yang kuat untuk mengamankan cadangannya dari pengaruh Baghdad dan Tehran. Tidak hanya itu, KRG juga harus mengatasi konflik internalnya antara KDP dengan PUK. Di sisi lain, bukan faktor domestik saja yang harus diatasi, tetapi juga faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah bagaimana KRG dapat melobi Turki dan negara-negara Teluk untuk memfasilitasi ekspor gas alam dari Kurdistan Irak. Selain itu, peran AS sebagai sekutu historis Kurdistan Irak juga harus diapresiasi agar KRG dapat memperkuat posisi geopolitiknya. Maka dari itu, KRG harus dapat mengentaskan perselisihan domestiknya serta menjamin dukungan eksternal untuk mengamankan potensi gas alamnya (Aladin, 2023).

Penelitian keempat yang berjudul **The Oil Policy and Independence of the Kurdistan Regional Government** karya Ebrahim Abbassi, S. Salehi, dan Mohammad Salehi menjelaskan mengenai kebijakan minyak KRG yang memiliki orientasi utama

pada pencapaian kemerdekaan politik penuh, selain bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi wilayah tersebut. KRG mengelola sekitar sepertiga dari total cadangan energi terbukti di Irak, yang menjadikan wilayah ini sebagai aktor penting dalam sektor energi nasional. Namun, potensi ekonomi tersebut belum berhasil digunakan secara optimal sebagai alat tawar untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sistem geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tidak mendukung upaya pemisahan diri dari negara induk. Beberapa studi menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi KRG dalam mencapai kemerdekaan berkaitan dengan lemahnya jejaring diplomatik dan politik regional, serta kondisi keamanan yang tidak stabil akibat aktivitas kelompok teroris dan milisi bersenjata. Penolakan negara-negara tetangga seperti Turki, Iran, dan Suriah terhadap kemerdekaan Kurdi juga menjadi penghalang utama, mengingat kekhawatiran mereka terhadap bangkitnya gerakan separatis di dalam negeri. Dengan demikian, meskipun sektor energi menjadi kekuatan utama KRG, dinamika politik dan keamanan regional masih menjadi faktor penghambat dalam realisasi aspirasi negara Kurdi yang merdeka (Abbassi, et al., 2022).

Penelitian terakhir yang berjudul **The KRG's Inability Factors for Independently Exporting Oil: After 2023** karya Shallaw Abdulkhaleq Mohammed dan Ramyar Rashid Ahmed menjelaskan tentang faktor-faktor yang menghambat kemampuan KRG untuk mengeksport minyak secara mandiri setelah tahun 2023. Studi ini mengkaji upaya jangka panjang KRG dalam mencapai penentuan nasib sendiri serta hak pengelolaan sumber daya hidrokarbon (minyak dan gas) yang dijamin dalam Konstitusi Irak tahun 2005. Penelitian ini menyoroti pergeseran pendekatan KRG dari penggunaan taktik *hard power* menuju strategi *soft power* yang berfokus pada pembangunan ekonomi, penciptaan pendapatan, dan otonomi politik. Cadangan minyak dan gas yang melimpah di wilayah Kurdistan memainkan peran penting dalam

membentuk kebijakan utama KRG, yang berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan dan konsolidasi regional. Lebih lanjut, penelitian ini membahas secara mendalam perselisihan utama antara KRG dan pemerintah pusat Irak di Baghdad terkait sektor energi dan minyak KRG. Penelitian ini secara kritis menganalisis klaim hukum KRG untuk menjalankan operasi ekspor minyak secara independen di tengah penolakan dari pemerintah Irak. Meskipun KRG mengajukan klaim tersebut, ambisi ekspor minyak mereka menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan ini mencakup perpecahan politik internal dan kelemahan institusional dalam tubuh KRG, tekanan politik, ekonomi, dan hukum yang terus-menerus dari Baghdad, serta upaya regional dan geopolitik untuk meminggirkan posisi Kurdi dalam diskusi terkait energi. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas berbagai faktor yang terus menghambat aspirasi KRG dalam mengeksport minyak secara independen (Mohammed, et al, 2024).

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Teori Sekuritisasi

Teori Sekuritisasi merupakan teori yang pertama kali digagas oleh Barry Buzan dan Ole Wæver pada awal tahun 1990an yang memiliki fokus terhadap bagaimana kaum konstruktivis melihat keamanan. Aliran ini juga dikenal sebagai The Copenhagen School karena berasal dari Copenhagen Peace Research Institute di Denmark. Teori sekuritisasi, yang awalnya dikembangkan oleh Copenhagen School, merupakan kerangka kerja dalam hubungan internasional yang mengkaji bagaimana isu diubah menjadi masalah keamanan melalui praktik diskursif. Stritzel menyimpulkan bahwa sekuritisasi terjadi ketika aktor sekuritisasi (biasanya perwakilan negara) menyatakan suatu isu tertentu sebagai ancaman eksistensial terhadap objek acuan (seperti kedaulatan nasional, identitas, atau kelangsungan hidup), sehingga membenarkan

tindakan luar biasa untuk mengatasinya. Teori sekuritisasi tradisional menekankan peran *speech act* atau tindak tutur, dimana pernyataan ancaman oleh tokoh yang berwenang dapat menciptakan realitas sosial baru, yang secara efektif mengubah isu menjadi masalah keamanan (Stritzel, 2014, 43-48).

Teori ini dimunculkan pada waktu setelah berakhirnya Perang Dingin, dimana terjadinya debat antara dua belah pihak, yaitu “narrowers” dan wideners”. Kaum “narrowers” seringkali memperhatikan dengan keamanan negara dan berfokus pada analisis stabilitas militer dan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menyikapi hal tersebut, kaum “wideners” berupaya memasukkan jenis ancaman lain yang tidak bersifat militer dan lebih berdampak pada masyarakat dibandingkan negara. Perbedaan pendapat ini kemudian menjadi Tidak hanya itu, hal tersebut merupakan perkembangan penting dalam munculnya perspektif yang lebih luas mengenai keamanan (Eroukhmanoff, 2018).

Teori ini kemudian dijadikan tulisan yang komprehensif pada tahun 1998 dengan judul *Security: A New Framework for Analysis* karya Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap de Wilde. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa sekuritisasi merupakan suatu proses di mana suatu isu dibingkai sebagai ancaman eksistensial terhadap suatu objek rujukan, sehingga pelaku dapat menjustifikasikan tindakannya untuk mengatasi objek yang dianggap ancaman. Konsep ini menekankan peran wacana dan konstelasi politik dalam sekuritisasi. Prosesnya melibatkan aktor sekuritisasi yang menampilkan suatu isu sebagai ancaman eksistensial, yang kemudian harus diterima oleh masyarakat luas agar dianggap berhasil dalam sekuritisasi (Buzan et al., 1998, 18-19).

Sekuritisasi yang dianggap berhasil memiliki tiga komponen utama, yaitu identifikasi ancaman eksistensial, penerapan tindakan darurat, dan dampak terhadap hubungan antar unit dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Fokus utama

sekuritisasi adalah bersifat sosial dibandingkan teknis, dan bergantung pada interaksi antara pelaku sekuritisasi dan audiensnya (masyarakat). Praktek sekuritisasi merupakan praktek analisis terhadap ancaman dan keamanan, dengan fokus pada siapa yang melakukan sekuritisasi, isu apa, untuk siapa, mengapa, dengan hasil apa, dan dalam kondisi apa. Penting untuk dipahami bahwa sekuritisasi dapat menyebabkan dilema keamanan jika digunakan secara berlebihan atau ketidakmampuan untuk menangani masalah secara efektif jika kurang dimanfaatkan (Buzan et al., 1998, 21-26).

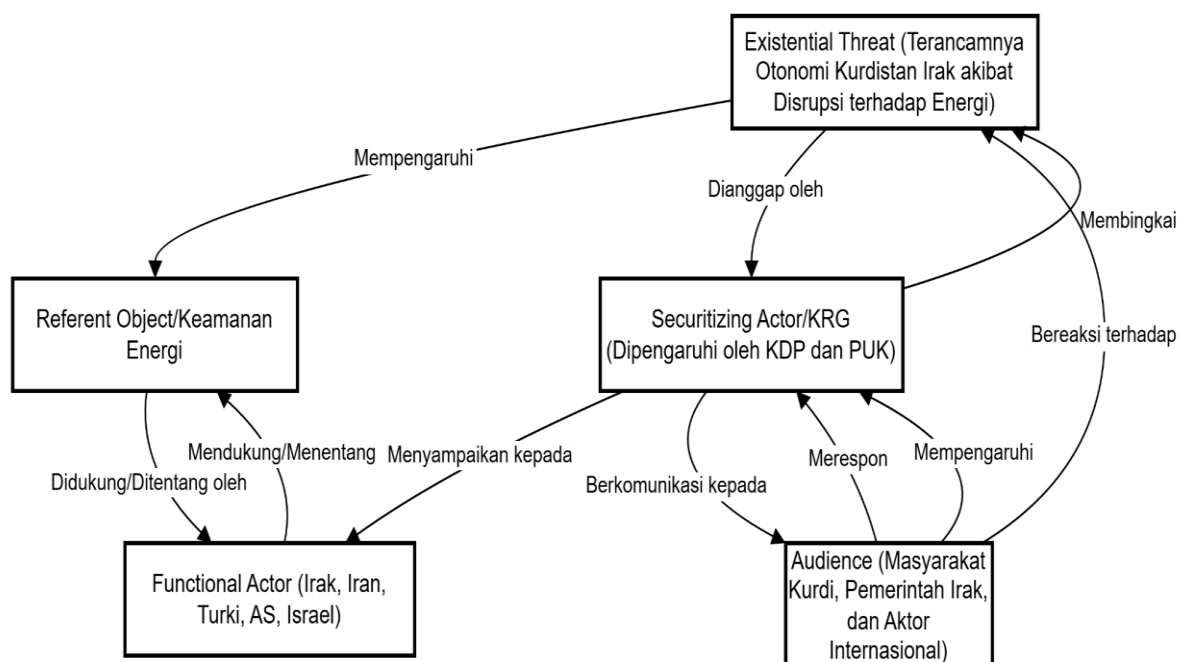
Dalam buku yang sama, dijelaskan juga mengenai kerangka analisis keamanan dari teori sekuritisasi yang mencakup sektor ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Perluasan agenda keamanan untuk mencakup sektor-sektor yang lebih luas di luar sektor militer dan politik tradisional bukanlah tindakan yang sepele dan membawa konsekuensi politik yang signifikan. Hal ini memerlukan definisi yang lebih cermat mengenai apa yang dimaksud dengan keamanan dan penerapan pemahaman tersebut pada berbagai dinamika yang secara fundamental berbeda dengan dinamika militer-politik. Selain itu, adanya pendekatan sektoral ini dapat mempertahankan hubungan yang kuat dengan studi keamanan tradisional, sehingga memungkinkan adanya interoperabilitas antara pendekatan lama dan baru. Hal ini memungkinkan penggabungan wawasan dari studi keamanan tradisional ke dalam kerangka kerja multi-sektoral yang lebih luas. Tidak hanya itu, retorika sektoral menimbulkan kebutuhan akan tindak lanjut analitis untuk memahami konsekuensi politik yang lebih dalam dari tindakan sekuritisasi. Hal ini penting untuk mengatasi interaksi kompleks berbagai nilai seperti kedaulatan, kekayaan, identitas, dan keberlanjutan dalam berbagai sektor (Buzan et al., 1998, 64) .

Kerangka kerja ini menyoroti kecenderungan isu-isu di satu sektor, khususnya liberalisme ekonomi, untuk menyebar ke sektor lain. Hal ini memerlukan pendekatan

komprehensif untuk memahami keamanan yang melampaui batas-batas sektoral. Sebagian besar agenda yang muncul dari kerangka ini terletak pada bidang International Political Economy (IPE). Keterkaitan ini memungkinkan studi keamanan untuk memanfaatkan keahlian IPE dan menghadapi aspek keamanan dari isu-isu ekonomi, daripada membuangnya ke zona batas yang steril antara IPE dan studi keamanan. Secara keseluruhan, kerangka kerja baru ini bertujuan untuk menghilangkan dikotomi yang tidak membantu antara kelompok tradisional dan kelompok yang lebih luas dalam studi keamanan, serta mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan komprehensif mengenai isu-isu keamanan (Buzan et al., 1998, 102-104).

Terdapat lima poin penting yang mencakup pokok-pokok dari The Copenhagen School. Pertama, adanya kondisi yang melatarbelakangi proses sekuritisasi. Misalnya, terdapat konteks tertentu (*speech act*, posisi pelaku *speech act*, dan latar historis) yang mendorong terjadinya proses sekuritisasi. Kedua, adanya gerakan untuk melakukan sekuritisasi. Hal ini terjadi ketika, sebuah aktor berusaha mengkonstruksikan suatu isu terhadap suatu objek yang dijadikan sebagai ancaman melalui *speech act*. Ketiga, terjadinya proses sekuritisasi setelah *speech act* berhasil dilakukan. Proses ini merupakan proses aktor mendefinisikan suatu objek sebagai ancaman dan diterima oleh masyarakat yang menjadi audiensnya. Keempat, Desekuritisasi dilakukan setelah objek yang dimaksud telah berhasil dilenyapkan dari lingkup keamanan dan masuk kembali ke konfigurasi politik normal. Terakhir, teori ini melihat sektor-sektor keamanan terdiri dari sektor militer, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang kelima memiliki relasi keamanan antara satu sama lain terhadap objek yang disekuritisasi (Williams, 2008, 70). Dengan demikian, teori sekuritisasi merupakan alat analisis dalam melihat bagaimana objek dijadikan ancaman keamanan oleh aktor.

Teori sekuritisasi memiliki keterkaitan dengan fenomena dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Fenomena keamanan Kurdistan Irak yang terjadi saat ini merupakan hasil dari adanya hal yang dianggap menjadi masalah oleh para aktor yang ada di kawasan Timur Tengah. Masalah ini kemudian disekuritisasi oleh aktor sebagai *existential threat* dan menjadi persoalan utama dalam fenomena. Proses inilah yang nantinya diteliti di bagian selanjutnya untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Lebih lengkapnya, keterkaitan antara fenomena dengan teori dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 1.1. Kerangka Teoritis
(Sumber: Penulis)

Berdasarkan penjelasan asal-usul serta kerangka analisis dari teori sekuritisasi, fenomena yang sedang terjadi di Kurdistan Irak dapat dianalisa menggunakan teori tersebut. Terjadinya kekhawatiran terhadap isu energi yang dapat berdampak ke aspek ekonomi dan khususnya geopolitik di kawasan tersebut dan Timur Tengah. Untuk itu, penulis melihat potensi teori sekuritisasi sebagai alat analisis dalam melakukan

penelitian terhadap perilaku para aktor di Kurdistan Irak, baik secara internal maupun eksternal.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1 Geopolitik

Geopolitik merupakan sebuah pendekatan terhadap urusan internasional kontemporer yang menekankan pada studi sejarah, geografi dan, budaya. Menurut Foreign Policy Research Institute (FPRI), geopolitik memiliki peran penting dalam ilmu Hubungan Internasional (Granieri, 2015). Hal ini dikarenakan konsep geopolitik mampu memberikan kerangka berpikir untuk memahami interaksi antar negara berdasarkan faktor geografis. Geopolitik menekankan pentingnya konfigurasi geografis, seperti lokasi sumber daya alam, kekuatan ekonomi, dan posisi strategis, dalam membentuk hubungan internasional. Hal ini menggarisbawahi bahwa mengamankan dominasi politik bukan semata-mata tentang memiliki kekuasaan namun juga bergantung pada bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan pada kondisi geografis tertentu. Tidak hanya itu, geopolitik juga mempengaruhi hubungan antara dua negara maupun regional. Sebagai akibatnya, geopolitik dapat menjadi tolok ukur bagi aktor negara maupun non-negara untuk menentukan arah kebijakannya dalam menyikapi segala dinamika di suatu kawasan. Salah satu contohnya adalah munculnya kelompok etnis transnasional dan arus komoditas, keuangan, dan migran internasional, yang menentang dominasi negara dalam hubungan internasional. Fenomena globalisasi ini menyoroti bagaimana perubahan dalam perkembangan ekonomi dan etnis minoritas, yang masing-masing memiliki wilayah geografisnya sendiri, dapat berdampak pada keamanan negara (Sloan, 2017).

1.6.1.2 Keamanan Energi

Keamanan Energi adalah salah satu bagian dari *human security* yang membahas mengenai bagaimana akses energi dapat dijaga. Konsep tersebut sudah dicanangkan sejak terjadinya Krisis Suez pada tahun 1956 silam. Keamanan energi dianggap sebagai kondisi mendasar bagi pembangunan ekonomi dan semakin diakui sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam keamanan nasional. Negara-negara bergantung pada pasokan energi yang stabil dan aman untuk mendukung kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Memastikan keamanan energi sangat penting bagi kedaulatan dan kemandirian suatu negara, karena hal ini mengurangi kerentanan terhadap gangguan eksternal dalam pasokan energi. Negara-negara sering kali mengembangkan program keamanan energi untuk memitigasi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga energi, gangguan pasokan, atau ketegangan geopolitik yang dapat berdampak pada sumber energi mereka. Keamanan energi juga berperan dalam membentuk hubungan internasional, karena akses terhadap sumber daya energi dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan aliansi strategis antar negara (Strojny et al., 2023). Secara keseluruhan, ketahanan energi berkaitan erat dengan kepentingan dan keamanan negara, sehingga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya energi secara efektif untuk mendukung tujuan pembangunan dan keamanan nasional. Dengan demikian, keamanan energi merupakan salah satu keamanan yang paling penting bagi negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politiknya.

1.6.1.3 Kurdistan Irak

Kurdistan Irak merupakan suatu wilayah otonom yang berada di Irak, Timur Tengah. Wilayah tersebut didiami oleh etnis Kurdi yang merupakan suku bangsa tersendiri. Selama ini, etnis Kurdi memperjuangkan hak untuk menentukan nasibnya

sendiri dalam membentuk suatu negara baru. Akan tetapi, karena tersebarnya bangsa Kurdi di beberapa negara seperti Turki, Iran, Suriah, dan Irak, maka mereka kesulitan untuk mendirikan baru. Namun, di Irak mereka diberikan otonomi yang tinggi dan berhak mendirikan pemerintahan regional sendiri di bawah pemerintah pusat Irak. Otonomi tersebut diperoleh setelah berakhirnya Perang Teluk pada tahun 1991, ketika pasukan koalisi di bawah AS dan Inggris memberlakukan zona larangan terbang dan men di Kurdistan Irak. Hal ini mencegah pasukan Pemerintah Irak di bawah Saddam Hussein untuk melanjutkan genosida terhadap suku Kurdi dan memungkinkan mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri. Pada tahun 1992, Front Kurdistan Irak, sebuah aliansi partai politik, mengadakan pemilihan parlemen dan presiden dan mendirikan KRG, sebuah pemerintah otonom baru Kurdistan di Irak. KRG sendiri mengelola enam provinsi Kurdistan Irak, dimana tiga di antaranya dikuasai penuh oleh KRG. Ibu kota unit otonom ini adalah Erbil, yang dikenal sebagai Hewlêr dalam bahasa Kurdi (Musioł, 2019). Kurdistan Irak memiliki sejarah yang kompleks, termasuk periode konflik dan upaya kemerdekaan, serta keterlibatan yang signifikan dalam lingkup politik Irak.

Di sisi lain, perlu dielaborasi juga mengenai Timur Tengah sebagai kawasan regional Kurdistan Irak. Timur Tengah merupakan suatu kawasan di Asia bagian barat yang terdiri atas negara-negara Arab, Persia, dan Turki (Özalp, 2011). Istilah ini menjadi dikenal luas ketika ahli strategi angkatan laut Amerika Alfred Thayer Mahan menggunakan istilah tersebut pada tahun 1902 untuk menunjukkan wilayah antara Arab dan India. Mahan menyadari tidak hanya pentingnya kawasan ini secara strategis, namun juga pusatnya, Teluk Persia. Ia menyebut wilayah di sekitar Teluk Persia sebagai Timur Tengah, dan mengatakan bahwa setelah Terusan Suez di Mesir, wilayah tersebut merupakan jalur paling penting yang harus dikontrol suatu negara.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1 Geopolitik

Geopolitik menjadi faktor paling penting dalam melihat fenomena eksistensi Kurdistan Irak serta masa depannya dalam lima tahun ke depan. Faktor ini menentukan bagaimana KRG menentukan arah kebijakan serta langkah yang harus diambil di tengah dinamika regional yang sedang terjadi. Selain itu, geopolitik juga dapat dikaitkan dengan posisi Kurdistan Irak di Timur Tengah di tengah aktor-aktor negara lainnya (Ali, 2021). Secara eksternal, geopolitik membentuk perilaku KRG dalam beradaptasi serta menghadapi tantangan dalam menghadapi aktor-aktor luar. Munculnya tantangan-tantangan seperti terjadinya konflik di Suriah, Lebanon, dan Gaza dapat mempengaruhi persepsi KRG dalam mengamankan posisinya. Apalagi, KRG beroperasi di kawasan Kurdistan Irak, dimana kawasan tersebut sempat terancam oleh agresi ISIS pada tahun 2014 hingga 2017. Lebih lanjut, geopolitik juga mempengaruhi aspek internal berupa kemampuannya dalam mengelola sumber daya alam di Kurdistan Irak serta menjaga keseimbangannya dalam menjalin hubungan dengan Irak (Hiltermann, 2023). Maka dari itu, geopolitik memiliki peran penting dalam meneliti fenomena tersebut.

1.6.2.2 Keamanan Energi

Keamanan Energi menjadi isu yang disekuritisasi oleh para aktor yang terlibat di Kurdistan Irak. Apalagi, daerah tersebut mengandung banyak cadangan energi, termasuk minyak bumi dan gas alam. Isu tersebut mulai digaungkan oleh KRG ketika hak atas pengelolaan energinya mulai ditentang oleh pemerintah pusat Irak. Selain itu, ketidakpastian atas pengelolaan sumber daya energi tersebut dapat melemahkan posisi geopolitik Kurdistan Irak dan KRG sebagai aktor utama (Nazarova, 2022). Tidak hanya itu, rivalitas internal di dalam tubuh KRG antara KDP dengan PUK dapat

mempengaruhi posisi lembaga otonom Kurdistan Irak tersebut dalam isu keamanan energi. KDP dan PUK sama-sama melakukan sekuritisasi terhadap isu keamanan energi tersebut. Sayangnya, kedua partai tersebut memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai isu tersebut (Jaff, 2024). Hal ini yang membuat isu ini bisa jadi membuat keutuhan KRG ikut terganggu.

1.6.2.3. Kurdistan Irak

Kurdistan Irak merupakan objek utama dalam fenomena serta penelitian ini. Adanya fenomena yang terjadi pada kawasan tersebut menjadikannya sebagai fokus utama bagi penelitian. Apalagi, Kurdistan Irak dikelola oleh KRG yang menjadi subjek penelitian dari penelitian ini. Hal ini menjadikan Kurdistan Irak sebagai pusat dari penelitian ini, dimana mayoritas fenomena terjadi serta berdampak bagi kelangsungan Kurdistan Irak sebagai wilayah otonom di Irak. Selain itu, wilayah ini secara historis memiliki tingkat resiliensi yang sangat tinggi. Resiliensi tersebut kemudian kembali diuji tatkala munculnya krisis internal dalam KRG dan sengketa atas hak pengelolaan sumber daya energi di Kurdistan Irak (Nicola, 2024). Untuk itu, wilayah ini memiliki peran penting dalam penelitian sebagai objek dalam terjadinya fenomena yang ingin diteliti.

Di sisi lain, Timur Tengah merupakan wilayah dimana Kurdistan Irak eksis dan KRG beroperasi. Wilayah ini memiliki signifikansi penting dalam mempengaruhi kebijakan KRG dalam menyelami berbagai dinamika yang terjadi pada tetangga-tetangganya. Selain itu, Timur Tengah juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang paling dinamis dan tidak stabil. Hal ini dikarenakan banyaknya konflik multidimensi yang terjadi disana. Secara geopolitik, Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat kompetitif, dimana banyak aktor negara maupun non-negara saling berkompetisi dan membentuk aliansi masing-masing demi menjaga kepentingan serta identitas mereka.

Melihat konfigurasi tersebut, Kurdistan Irak sebagai salah satu wilayah yang mendiami kawasan Timur Tengah harus berhati-hati dalam menyikapi segala dinamika geopolitik yang ada, termasuk dalam hal keamanan energi (Musioł, 2019). Dengan demikian, KRG harus memperhatikan kondisi geopolitik di Timur Tengah demi mendapatkan hasil yang baik untuk Kurdistan Irak.

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang, teori, dan konsep di atas, penulis berargumen bahwa masa depan Kurdistan Irak ditentukan oleh aspek domestik serta bagaimana mereka dapat mengamankan sumber energinya di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah. Aspek domestik yang dimaksud adalah hubungan antara KDP dengan PUK dalam lembaga pemerintahan KRG yang mengatur Kurdistan Irak. Selain itu, aspek domestik lainnya adalah hubungan antara KRG dengan pemerintah pusat Irak. Di sisi lain, KRG juga harus memperhatikan aspek eksternal berupa aktor-aktor negara lainnya dengan cermat dan hati-hati. KRG sebagai lembaga pemerintahan Kurdistan Irak harus memperkuat keutuhannya dan menjadi kewajiban KDP serta PUK untuk menyelesaikan perseteruannya dan fokus untuk memperkuat posisi Kurdistan Irak di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah. Pada akhirnya, KRG tetap mampu mempertahankan eksistensi Kurdistan Irak untuk menjamin otonomi bangsa Kurdi di Irak.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode tersebut merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak digunakan. Metode ini menjelaskan bagaimana penelitian dapat menghimpun data-data yang bersifat non-angka dan non-statistik. Tujuan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis fenomena atau objek penelitian melalui indikator, seperti paham, sikap, dan tindakan. Metode ini menggunakan teori yang sudah ada untuk menjelaskan sesuatu dan pada akhirnya menciptakan teori baru.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran terkait suatu fenomena yang menjadi subjek penelitian. Selain itu, tipe ini berusaha menjelaskan mengenai hubungan antar variabel yang saling berkaitan.

1.8.2. Situs Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat situs penelitian yang menjadi lokasi dari penelitian tersebut. Situs tersebut merupakan Kurdistan Irak yang berada di negara Irak. Situs penelitian memiliki peran penting dalam menghimpun dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, situs penelitian dapat membantu menentukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Sumber dalam penelitian ini menggunakan data-data dari tahun 2019 hingga 2024. Namun, data yang memiliki keterkaitan dengan variabel dan analisis selain di tahun yang disebutkan juga dilampirkan sebagai bahan bantu penelitian.

1.8.3. Subjek Penelitian

Kurdistan Regional Government (KRG) selaku aktor utama dalam fenomena ini menjadi subjek penelitian untuk memahami bagaimana masa depan Kurdistan Irak di

tengah dinamika geopolitik Timur Tengah selama di bawah kendalinya. Lebih lanjut, penelitian ini berniat untuk menganalisa bagaimana KRG menyikapi konflik internal serta tekanan eksternalnya untuk mencapai keamanan, khususnya di bidang energi.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah frasa, simbol, serta teks yang menjadi representasi atas variabel. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi pustaka yang digunakan untuk menghimpun data-data sekunder. Maka dari itu, diharapkan jenis data ini dapat menunjang penelitian secara menyeluruh dengan kredibilitas tinggi.

1.8.5. Sumber Data

Dalam sumber data, terdapat data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumber utama tanpa melewati pihak lain. Data sejenis ini biasanya ditemukan lewat dokumen resmi, pidato kenegaraan, maupun keterangan resmi dari pihak terkait. Selain itu, data primer dapat dijumpai dalam bentuk wawancara melalui media sosial. Di sisi lain, data sekunder dapat ditemukan dalam studi pustaka, seperti teks, artikel, literatur, dan analisa pihak lain. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menghimpun dan mengolah data yang menjadi bahan penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diambil peneliti dalam melakukan penelitiannya adalah dengan melakukan telaah pustaka. Teknik ini termasuk cara dalam mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia di media internet maupun pustaka, seperti buku, jurnal, laporan tahunan, artikel, dan berbagai informasi dari situs resmi pemerintahan maupun analisa pihak lain.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan hasil analisis yang menyeluruh terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik tersebut dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Miles et al., 2014). Urutan dalam melakukan analisis serta interpretasi data adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti akan mengumpulkan data primer maupun data sekunder sesuai dengan penelitian. Kedua, peneliti akan mereduksi data yang telah dihimpun untuk memudahkan dalam proses seleksi data, fakta, dan variabel yang cocok dengan penelitian. Hal ini akan membuat peneliti lebih mudah untuk menghubungkan keterkaitan data dengan fenomena yang diteliti. Pada akhirnya, data-data yang telah disajikan akan ditarik suatu kesimpulan melalui proses verifikasi secara menyeluruh.

1.8.8. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengupayakan untuk menjamin kualitas data yang telah dihimpun, diolah, dan ditulis dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas serta validitasnya. Peneliti juga menjamin bahwa setiap data yang dihimpun akurat dan relevan dengan fenomena yang diteliti. Selain itu, data yang diperoleh merupakan data langsung dari situs resmi KRG dan aktor-aktor terkait lainnya. Tidak hanya itu, kualitas data yang diperoleh sesuai dengan kaidah akademik serta kepenulisan.